



Bahan Paparan disampaikan dalam rangka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2025 Kerjasama antara DPN Peradi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember dan DPC Ikadin Jember
Tanggal, 24 Agustus 2025

PENELUSURAN

HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM

RUMAWI

Pengajar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

rumawi@uinkhas.ac.id



Sumber: <https://www.pinterest.com/pin/654921970799869079/>



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM
JEMBER



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



DEWAN PIMPINAN CABANG
IKATAN ADVOKAT INDONESIA
JEMBER

PKPA 2025

PENDIDIKAN KHUSUS
PROFESI ADVOKAT

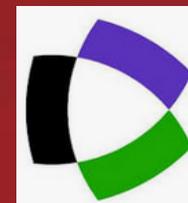
23 AGUSTUS s/d
21 SEPTEMBER 2025



iD



RUMAWI



PENELUSURAN

HUKUM DAN
DOKUMENTASI
HUKUM

PENELUSURAN HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM

PENELUSURAN

HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM

RUMAWI

Pengajar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

rumawi@uinkhas.ac.id



01



**HIERARKI
PERUNDANG-
UNDANGAN DI
INDONESIA**

02



**TEHNIK DAN
METODE
PENELUSURAN
DOKUMEN
HUKUM**

03



**TUJUAN
PENELUSURAN
DOKUMEN
HUKUM**

04



**SUMBER-
SUMBER
HUKUM**

05



**RANCANGAN
DOKUMEN HUKUM
DALAM RANGKA
LITIGASI**

06



**CONTOH
KASUS**



PERADI
PERHIMPUNAN
HUKUM ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN
ADVOCATES ASSOCIATION



DEWAN PIMPINAN CABANG
IKATAN ADVOKAT INDONESIA
JEMBER

**PKPA
2025**

PENDIDIKAN KHUSUS
PROFESI ADVOKAT

23 AGUSTUS s/d
21 SEPTEMBER 2025



RUMAH

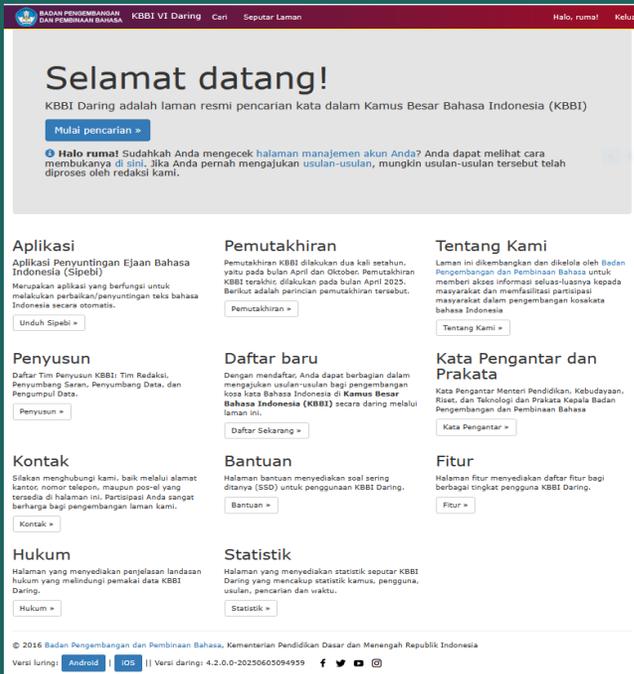
Section

01

**HIERARKI
PERUNDANG-
UNDANGAN DI
INDONESIA**

01 01

PENELUSURAN HUKUM



Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>

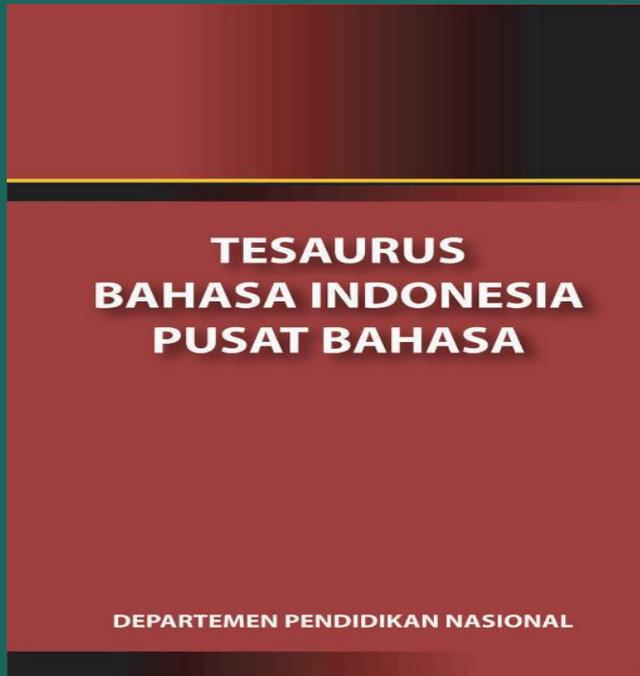
PENELUSURAN: N PENELAAHAN; PENJAJAKAN

HUKUM:

1. N PERATURAN ATAU ADAT YANG SECARA RESMI DIANGGAP MENGIKAT, DIKUKUHKAN OLEH PENGUASA ATAU PEMERINTAH;
2. N UNDANG-UNDANG, PERATURAN, DAN SEBAGAINYA UNTUK MENGATUR PERGAULAN HIDUP MASYARAKAT;
3. N PATOKAN (KAIDAH, KETENTUAN) MENGENAI PERISTIWA (ALAM DAN SEBAGAINYA) YANG TERTENTU;
4. N KEPUTUSAN (PERTIMBANGAN) YANG DITETAPKAN OLEH HAKIM (DALAM PENGADILAN); VONIS.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI daring



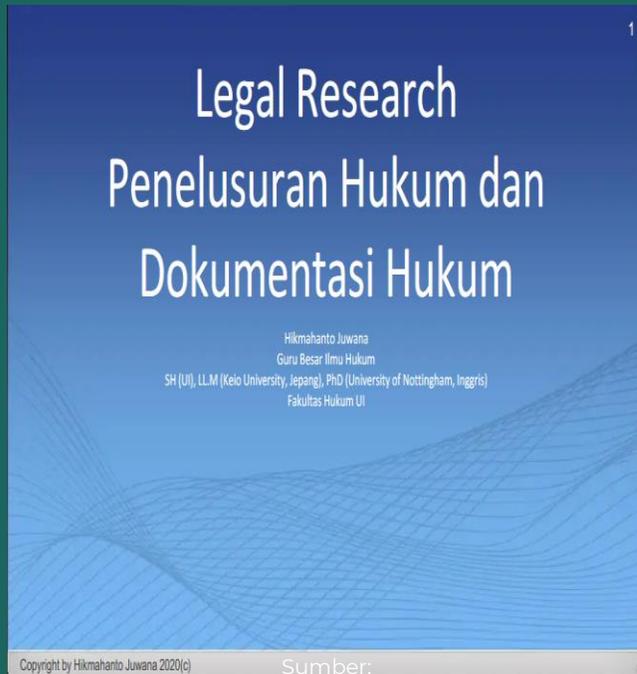


PENELUSURAN: n PELACAKAN, PENCARIAN, PENELAAHAN, PENJAJAKAN (hlm. 507)

HUKUM: n ADAT, ASAS, DASAR, KADA, KAIDAH, KANUN, KEKUASAAN, KEPUTUSAN, KETENTUAN, KETETAPAN, LEMBAGA, NORMA, PATOKAN, PERATURAN, PERINTAH, PRINSIP, RASAM, SYAIRAT, TAKDIR, TIOREM, UNDANG-UNDANG, YURA; (hlm. 193).

TESAURUS BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA





**PENELUSURAN HUKUM
DITERJEMAHKAN DARI
LEGAL RESEARCH, YAITU
SUATU PROSES UNTUK
MENEMUKAN DI MANA
ATURAN ATAU KAEDAH
BERADA.**

Hikmahanto Juwana, Legal
Research Penelusuran Hukum dan
Dokumentasi Hukum, Powerpoint,
2020)





Bahan Paparan disampaikan dalam rangka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2025 Kerjasama antara DPN Peradi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember dan DPC Ikadin Jember Tanggal, 24 Agustus 2025

PENELUSURAN

HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM

RUMAWI

Pengajar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

rumawi@uinkhas.ac.id



PENELUSURAN

HUKUM

SUATU UPAYA PENCARIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIASAAN, KAEDAH, PUTUSAN, DAN KEPUTUSAN DI TEMPAT KEBERADAANNYA UNTUK KEBUTUHAN TERTENTU.

01 02

DOKUMENTASI HUKUM

Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>

DOKUMENTASI:

1. N PENGUMPULAN, PEMILIHAN, PENGOLAHAN, DAN PENYIMPANAN INFORMASI DALAM BIDANG PENGETAHUAN
2. N PEMBERIAN ATAU PENGUMPULAN BUKTI DAN KETERANGAN (SEPERTI GAMBAR, KUTIPAN, GUNTINGAN KORAN, DAN BAHAN REFERENSI LAIN): PANITIA DILENGKAPI DENGAN SEKSI PAMERAN, PUBLIKASI, DAN --
3. N KOMP DESKRIPSI TERTULIS YANG KOMPREHENSIF DARI PERANGKAT LUNAK DALAM BERBAGAI BENTUK DAN TINGKAT PERINCIAN YANG SECARA JELAS MENDEFINISIKAN PERSYARATAN, KONTEN, KOMPOSISI, DESAIN, KINERJA, PENGUJIAN, PENGGUNAAN, DAN PEMELIHARAAN USULKAN MAKNA BARU.

Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) VI daring



TESAURUS
BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DOKUMENTASI: n PEMILIHAN, PENGARSIPAN, PENGOLAHAN, PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, PERBAHANAN (hlm. 137)

HUKUM: n ADAT, ASAS, DASAR, KADA, KAIDAH, KANUN, KEKUASAAN, KEPUTUSAN, KETENTUAN, KETETAPAN, LEMBAGA, NORMA, PATOKAN, PERATURAN, PERINTAH, PRINSIP, RASAM, SYAIRAT, TAKDIR, TIOREM, UNDANG-UNDANG, YURA (hlm. 193).

TESAURUS BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA





DOKUMEN HUKUM ADALAH PRODUK HUKUM YANG BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PRODUK HUKUM SELAIN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELIPUTI NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PUTUSAN PENGADILAN, YURISPRUDENSI, MONOGRAFI HUKUM, ARTIKEL MAJALAH HUKUM, BUKU HUKUM, PENELITIAN HUKUM, PENGKAJIAN HUKUM, NASKAH AKADEMIS, PERATURAN-UNDANG

1. **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL**
2. **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM**

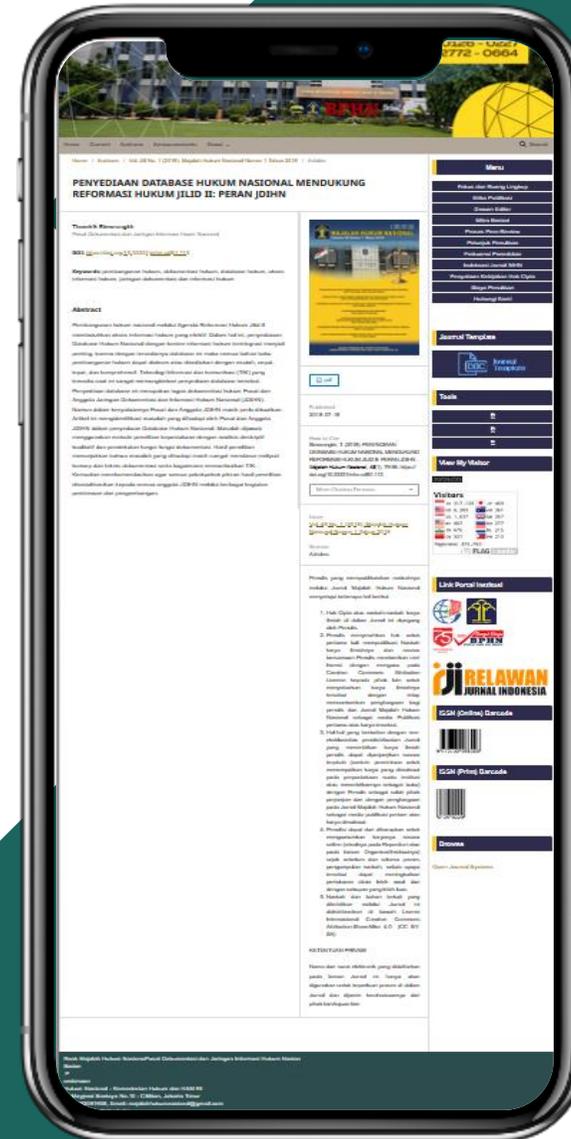
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

(PASAL 1 ANGKA 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL)

DOKUMENTASI HUKUM MENURUT:

THEODRIK SIMORANGKIR

DOKUMENTASI HUKUM ADALAH
PENGUMPULAN, PEMILIHAN,
PENGOLAHAN DAN
MENYIMPANAN INFORMASI
DALAM BIDANG PENGETAHUAN
HUKUM (2018: 83-84).



PENELUSURAN LITERATUR HUKUM,
OLEH:

**Gregory
Churchill**

USAHA MENEMUKAN
KAEDAH HUKUM,
TERUTAMA YANG
TERTULIS (1988: 1).

The screenshot displays the BACA journal website interface. At the top, the journal's logo and name 'BACA' are prominent, along with the ISSN numbers (2301-8593 Online, 0125-9008 Print) and the acronym 'LIPI'. Navigation menus for 'HOME', 'ABOUT', 'LOGIN', 'CATEGORIES', 'SEARCH', 'CURRENT', 'ARCHIVES', 'ANNOUNCEMENTS', and 'PUBLICATION FORMS' are visible. The article title 'PETUNJUK PENELUSURAN LITERATUR HUKUM INDONESIA' by Gregory Churchill is the central focus. The abstract discusses the challenges of finding legal precedents in Indonesian law. A sidebar on the right offers various services like 'Online Submission', 'Author Guidelines', and 'Plagiarism Checker'. At the bottom, there are links to various academic databases such as DOAJ, SINTA, Dimensions, and Google Scholar.

ISSN 2301-8593 (Online)
ISSN 0125-9008 (Print)

PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Open Access DOAJ CC BY-NC-ND

HOME ABOUT LOGIN CATEGORIES SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS PUBLICATION FORMS CONTACT US

Home > Vol 13, No 1-2 (1988) > Churchill

PETUNJUK PENELUSURAN LITERATUR HUKUM INDONESIA

Gregory Churchill

ABSTRACT

Setiap kali kita sebagai ahli hukum menghadapi suatu masalah atau persoalan, kita diharapkan membicarakan kaedah hukum yang berlaku terhadap persoalan tersebut. Kita ditantang untuk menjelaskan arti dari kaedah hukum itu dan memberitunjukkan tentang pelaksanaannya atau penerapannya terhadap masalah tersebut. Usaha menemukan kaedah hukum, terutama yang tertulis, merupakan usaha yang dinamakan penelusuran literatur hukum.

an segi-
/rap
ir

Full Text: PDF

DOI: <https://doi.org/10.14203/j.baca.v13i1-2.8>

Bookmark and Share

Copyright (c) Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Center for Scientific Data and Documentation - Indonesian Institute of Sciences Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, South Jakarta, DKI Jakarta 12710, Indonesia Slamet Riyanto

CC BY NC ND Copyright 2019 by PDDI LIPI, Design

BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi Index | DOAJ SINTA DIMENSIONS GOOGLE SCHOLAR GARUDA ISSN BASE PKP INDEX

Rectangular Snip

DOC BACA Template

- Online Submission
- Author Guidelines
- Focus and Scope
- Editorial Boards
- Peer-Reviewers
- Data Deposit Policy
- Publication Ethics
- Publication Charge
- Plagiarism Checker
- Archiving Policy
- Indexing & Abstracting
- Reviewer/Editor Join
- Statistic Report

USER

Username

Password

Remember me

LOGIN

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope All

SEARCH

Browse

- By Issue 14
- By Author
- By Title



RAGAM DOKUMEN HUKUM

<p>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>	 <p>1 6</p>	<p>BUKU HUKUM</p>
<p>PUTUSAN PENGADILAN</p>	 <p>2 7</p>	<p>PENELITIAN HUKUM</p>
<p>YURISPRUDENSI</p>	 <p>3 8</p>	<p>PENGAJIAN HUKUM</p>
<p>MONOGRAFI HUKUM</p>	 <p>4 9</p>	<p>NASKAH AKADEMIS</p>
<p>ARTIKEL MAJALAH/JURNAL HUKUM</p>	 <p>5 10</p>	<p>RANCANGAN PERUNDANG-UNDANG</p>



Bahan Paparan disampaikan dalam rangka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2025 Kerjasama antara DPN Peradi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember dan DPC Ikadin Jember Tanggal, 24 Agustus 2025



PENELUSURAN

HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM

RUMAWI

Pengajar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

rumawi@uinkhas.ac.id



PENELUSURAN DOKUMENTASI

HUKUM

PENGUMPULAN, PEMILIHAN,
PENGOLAHAN DAN MENYIMPANAN
INFORMASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIASAAN,
KAEDAH, PUTUSAN, DAN KEPUTUSAN.

01 03

HIERARKI PERUNDANG- UNDANGAN

© 2016 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>

HIERARKI: n URUTAN TINGKATAN ATAU JENJANG JABATAN (PANGKAT KEDUDUKAN) N ORGANISASI DENGAN TINGKAT WEWENANG DARI YANG PALING BAWAH SAMPAI YANG PALING ATAS N BIO DERETAN TATARAN BIOLOGIS, SEPERTI FAMILI, GENUS, SPESIES N KAT KUMPULAN PEMIMPIN GEREJA YANG TERDIRI ATAS USKUP, IMAM, DAN DIAKON USULKAN MAKNA BARU.

PERUNDANG-UNDANGAN: n YANG BERTALIAN DENGAN UNDANG-UNDANG; SELUK BELUK UNDANG-UNDANG.

Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) VI daring



TESAURUS
BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

HIERARKI:_n JENJANG, KEDUDUKAN, SKALA, STRATA, STRUKTUR, TAHAP, TANGGA, TATARAN, TINGKATAN (hlm. 190).

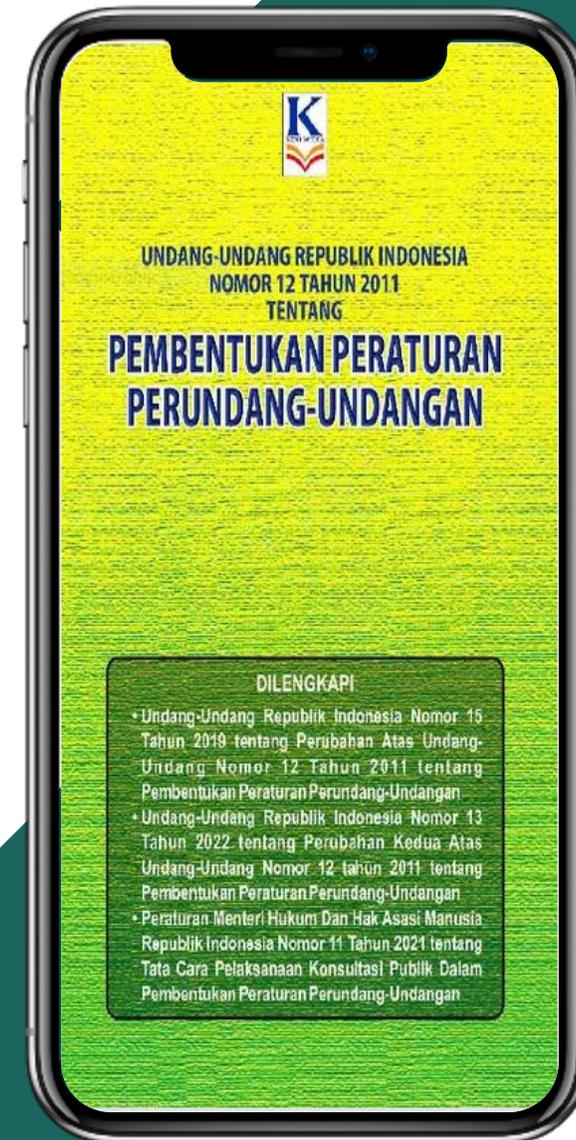
PERUNDANG-UNDANGAN DARI KATA UNDANG-UNDANG:_n HUKUM, KANON, KETENTUAN, KETETAPAN, KONSTITUSI, PERATURAN, QANUN, UNDANG-UNDANG DASAR (hlm. 544).

TESAURUS BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA



JENIS DAN **HIERARKI** PERATURAN **PERUNDANG-UNDANGAN**

- a. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
- b. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT;
- c. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG;
- d. PERATURAN PEMERINTAH;
- e. PERATURAN PRESIDEN;
- f. PERATURAN DAERAH PROVINSI; DAN
- g. PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.



PASAL 7 JO. PASAL 8 UU NO 12 TAHUN 2011

- A. BERSADARKAN PASAL TERSEBUT, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ADA TUJUH JENIS DAN KETUJUHNYA MEMILIKI KEDUDUKAN HIERAKI BERURUTAN.
- B. DI SAMPING ITU, ADA JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAINNYA, DIAKUI KEBERADAANNYA DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAU DIBENTUK BERDASARKAN KEWENANGAN.

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.



Bahan Paparan disampaikan dalam rangka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2025 Kerjasama antara DPN Peradi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember dan DPC Ikadin Jember Tanggal, 24 Agustus 2025



PENELUSURAN

HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM

RUMAWI

Pengajar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

rumawi@uinkhas.ac.id



HIERARKI

PERUNDANG- UNDANGAN

SUATU URUTAN TINGKATAN YANG BERTALIAN DENGAN SELUK BELUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



PERADI
PERHIMPUNAN
ADVOKAT INDONESIA
ADVOCATES ASSOCIATION



DEWAN PIMPINAN CABANG
IKATAN ADVOKAT INDONESIA
JEMBER

PKPA
2025

PENDIDIKAN KHUSUS
PROFESI ADVOKAT

23 AGUSTUS s/d
21 SEPTEMBER 2025



RUMAH

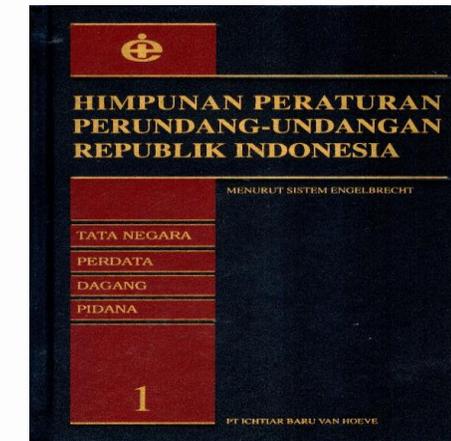
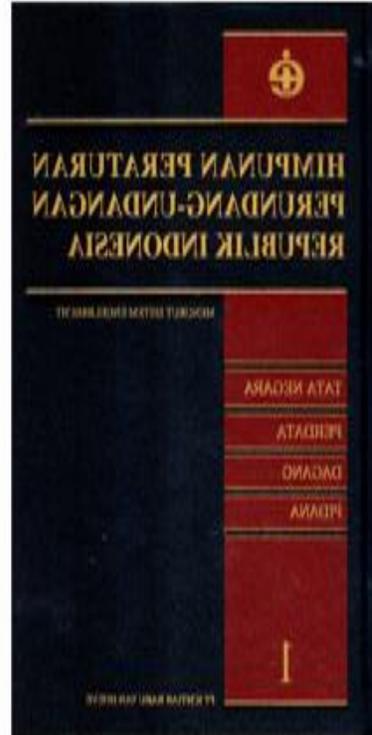
Section

02 TEHNIK DAN METODE PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM

TEHNIK DAN METODE PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM



**MODEL
PENELUSURAN
DOKUMEN HUKUM**



**MODEL
PENELUSURAN
DOKUMEN
HUKUM
SECARA
MANUAL**



**MODEL
PENELUSURAN
DOKUMEN
HUKUM
MELALUI
INTERNET**

MODEL PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM SECARA MANUAL

PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM SECARA MANUAL DIPERLUKAN DUA HAL (GREGORY CHURCHILL, 1988: 7-8):

1. ALAT-ALAT, BERUPA KATALOG, INDEKS, PETUNJUK, DAN LAIN SEBAGAINYA, YANG DAPAT MERNBANTU DALAM USAHA MENELUSURI DOKUMEN HUKUM.
2. DOKUMEN HUKUM, YANG BERUPA TERBITAN RESMI PEMERINTAH(LEMBARAN NEGARA, LERMBARAN DAERAH, BERITA NEGARA, BERITA DAERAH.) DAN TERBITAN SWASTA, MISAL: HIMPUNAN KUMPULAN, EDARAN BERKALA.

diadakan dalam rangka
Konsus Profesi Advokat (PKPA)
2025 Kerjasama antara DPN Peradi
dan Fakultas Hukum Universitas Islam
Jember dan DPC Ikadin Jember
tanggal, 24 Agustus 2025

SEM DAI
KUMEN
KUM

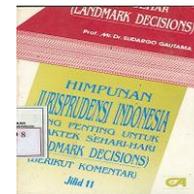
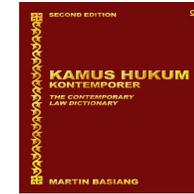
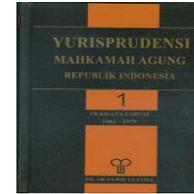
RUMAWI

Pengajar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

rumawi@uinkhas.ac.id

MODEL PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM SECARA MANUAL

PENELUSURAN SECARA MANUAL, YURIS HARUS MENCARI DOKUMEN-DOKUMEN HUKUM YANG BERUPA HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILA, HIMPUNAN BERITA NEGARA, HIMPUNAN BERITA DAERAH, DAN DOKUMEN-DOKUMEN HUKUM LAIN, DICARI DAN DITELISIK TERHADAP DOKUMEN-DOKUMEN ITU.



MODEL PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM MELALUI INTERNET

- A. SUMBER-SUMBER HUKUM YANG TERDAPAT DALAM DOKUMENTASI HUKUM TERSEBUT, DEWASA INI HAMPIR SEMUA (TIDAK SEMUANYA) DAPAT DITELUSURI SECARA ONLINE.
- B. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN) YANG DIMILIKI LEMBAGA PEMERINTAH DI PUSAT MAUPUN DARAH, YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE.
- C. JDIHN WADAH PENDAYAGUNAAN BERSAMA ATAS DOKUMEN HUKUM SECARA TERTIB, TERPADU, DAN BERKESINAMBUNGAN, SERTA MEMPUNYAI MERUPAKAN SARANA PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI HUKUM SECARA LENGKAP, AKURAT, MUDAH DAN CEPAT.



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN)

<https://jdihn.go.id/>
JDIHN sebagai pusat

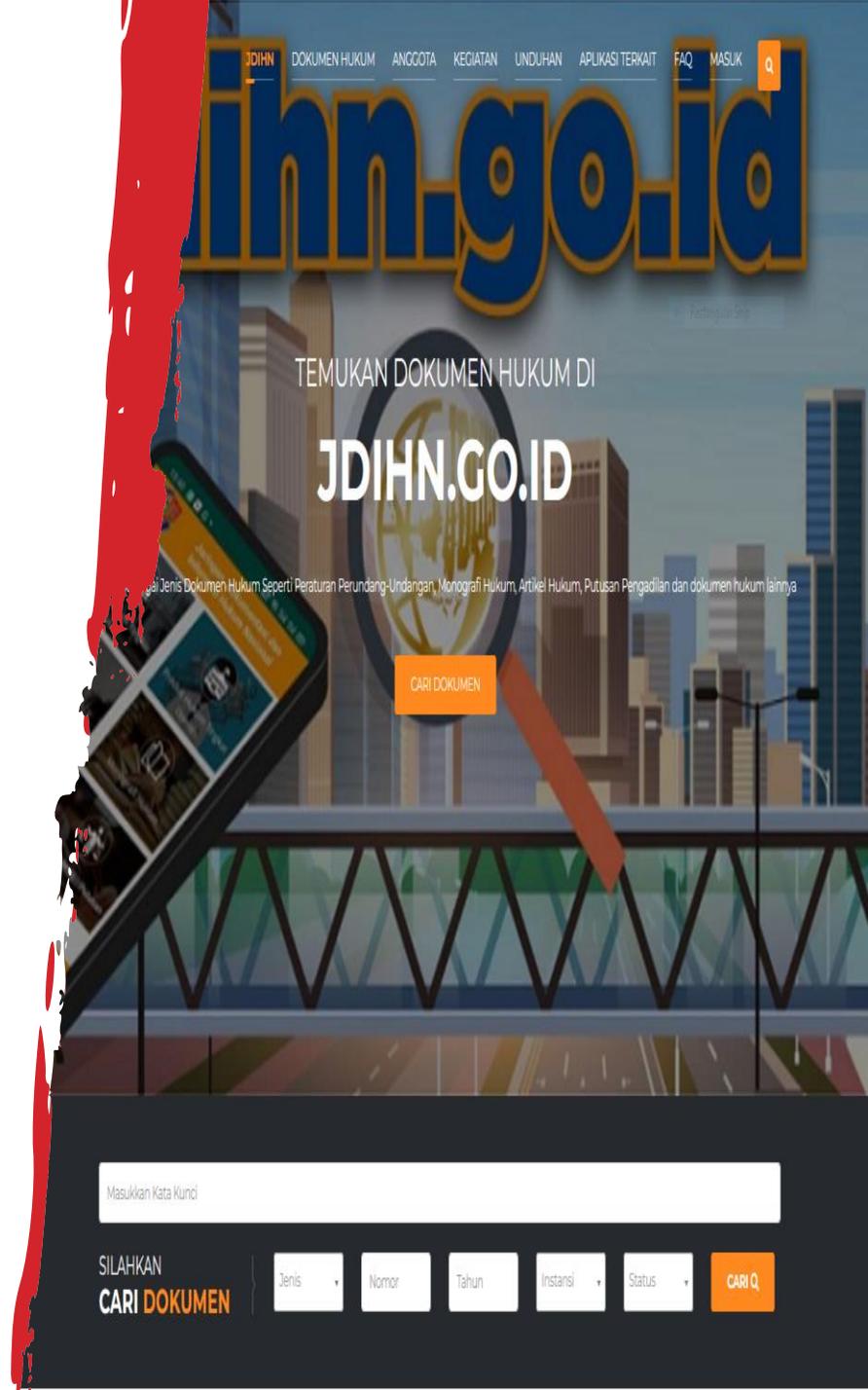
<https://peraturan.bpk.go.id/>
JDIHN DI BPK RI. SERING MUNCUL POSISI PALING ATAS DALAM PENCARIAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDGAN.

<https://peraturan.go.id/>
JDIHN DI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

<https://jdih.setneg.go.id/Produk>
JDIHN DI Kementerian Sekretariat Negara

<https://setkab.go.id/category/peraturan/>
WEBSITE YANG MEMUAT PERATURAN DI SECRETARIAT KABINET

<https://beritanegara.co.id/>
WEBSITE YANG MEMUAT BERITA NEGARA



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN)

<https://ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx>
LAMAN YANG TERKAIT DENGAN PERATURAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN

<https://lps.go.id/regulasi/>
LAMAN TERKAIT PERATURAN PENJAMINAN

<https://kppu.go.id/peraturan-perundang-undangan/>
LAMAN TERKAIT PERATURAN PERSAINGAN USAHA

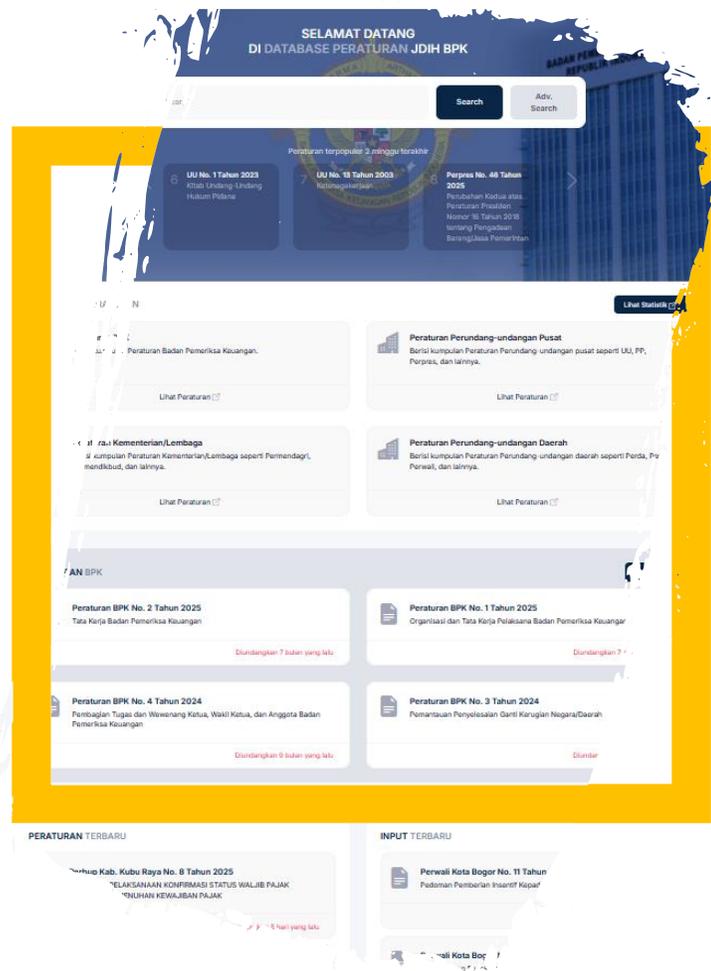
<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/index>
LAMAN TERKAIT PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Default.aspx>
LAMAN TERKAIT PERATURAN PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Peraturan terkait lainnya
DAPAT LANGSUNG MENGUNJUNGI WEBSITE TERKAIT, MISAL PERATURAN
DPR/MPR, BISA BERKUNJUNG KE LAMAN KEDUANYA, DLL

TEORI
HUKUM
DIGITAL





DATABASE

PERATURAN JDIH BPK

LAMAN JDIH YANG MUNCUL PALING ATAS

KETIKA KLIK 'UU BUMN', UU BUMN

DI PENCARIAN GOOGLE, MAKA

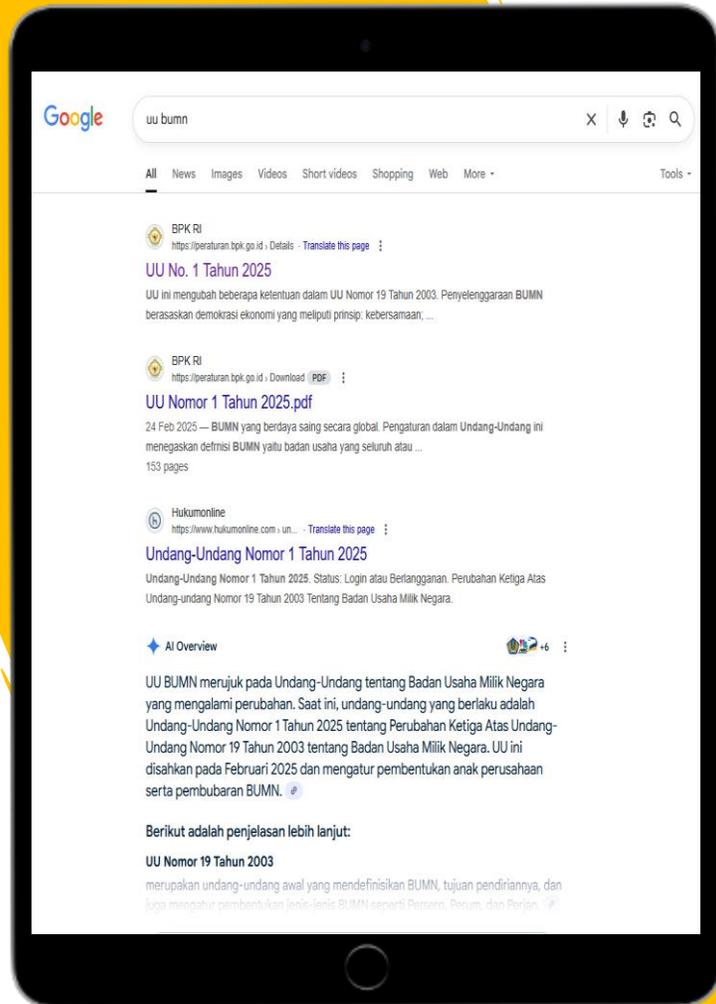
DISUGUHKAN UU BUMN TERBARU

OLEH GOOGLE DENGAN

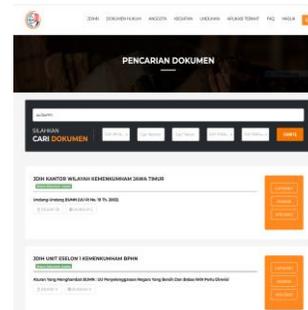
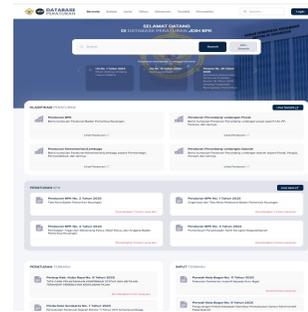
PENCARIAN PALING ATAS ADALAH

LAMAN JDIH BADAN PEMERIKSA

KEUANGAN (BPK) RI.



JDIH BPK



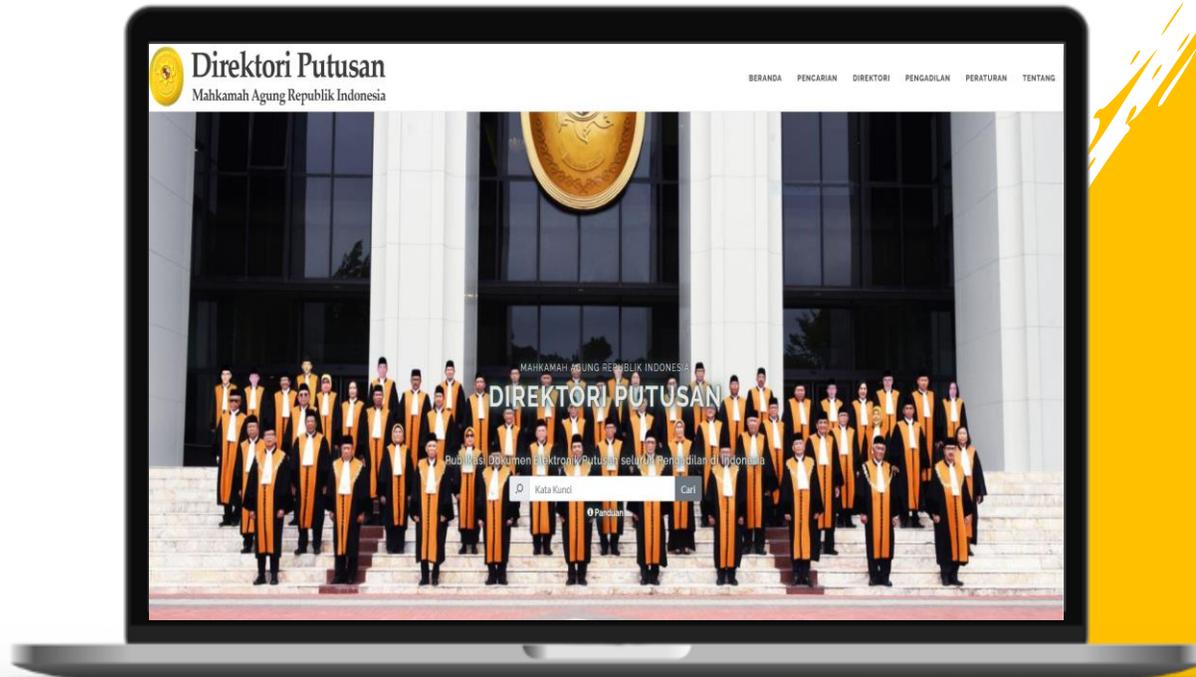
JDIH BPK NOMOR 1 PENCARIAN PERATURAN DI GOOGLE

HASIL PENCARIAN YANG DEMIKIAN TERSEBUT DIMUNGKINKAN LAMAN JDIH BPK SELALU UP DATE

LAMAN URUTAN BERIKUTNYA HASIL PENCARIAN DI GOOGLE

2. HUKUMONLINE
3. KOMISI INFORMASI PEMPROVE ACEH
4. JDIH KEMENTERIAN KEUANGAN
5. JDIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
6. DST

PENCARIAN PUTUSAN



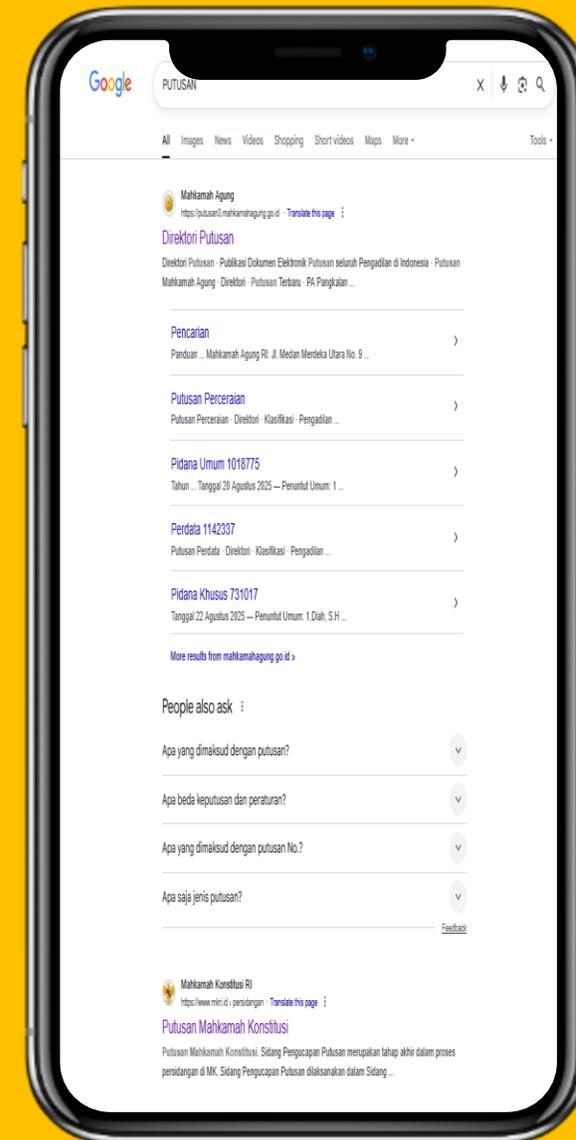
LAMAN PUTUSAN MA NOMOR 1
PENCARIAN PERATURAN DI
GOOGLE

HASIL PENCARIAN YANG DEMIKIAN
TERSEBUT DIMUNGKINKAN LAMAN
PUTUSAN MA SELALU UP DATE

MA NOMOR 1 DI GOOGLE

UNTUK PENCARIAN DENGAN KATA
'PUTUSAN' MAKA HARUS DIAKUI DAN
DIBERI JEMPOL, MAKA LAMAN
PUTUSAN MARI DALAM URUTAN TOP,
PALING ATAS, NOMOR 1, PENCARIAN
DI GOOGLE.

KEMUDIAN DIIKUTI LAMAN MKRI





PERADI
PERHIMPUNAN
HUKUM
INDONESIA
INDONESIAN
ADVOCATES ASSOCIATION



DEWAN PIMPINAN CABANG
IKATAN ADVOKAT INDONESIA
JEMBER

PKPA
2025

PENDIDIKAN KHUSUS
PROFESI ADVOKAT

23 AGUSTUS s/d
21 SEPTEMBER 2025



RUMAH

Section

03

**TUJUAN
PENELUSURAN
DOKUMEN
HUKUM**

TUJUAN PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM

- A. UNTUK MENGETAHUI PERATURAN YANG MENGATUR PERIHAL TERTENTU TERSEBUT BERADA.
- B. UNTUK MENEMUKAN KAEDAH HUKUM BERLAKU SECARA AKURAT.
- C. MENJELASKAN MAKNA DARI KAEDAH HUKUM TERSEBUT DAN MEMBERI PETUNJUK TENTANG PELAKSANAAN ATAU PENERAPAN KAEDAH HUKUM TERHADAP MASALAH TERSEBUT (GREGORY CHURCHILL, 1988: 1).

The screenshot displays the homepage of the journal 'BACA' (Jurnal Dokumentasi dan Informasi). The header includes the journal title, ISSN numbers (2301-8593 Online, 0125-9008 Print), and the publisher's name: 'PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA'. Navigation links for 'ABOUT', 'LOGIN', 'CATEGORIES', 'SEARCH', 'CURRENT', 'ARCHIVES', 'ANNOUNCEMENTS', 'PUBLICATION FORMS', and 'CONTACT US' are visible. The main content area shows a search result for 'PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA' by Gregory Churchill, with a DOI of 10.14203/j.baca.v13i1-2.8. The page also features a 'Manuscript Template' sidebar with various options like 'Online Submission', 'Author Guidelines', and 'Focus and Scope'. At the bottom, there are social media icons and a search bar.



PERADI
PERHIMPUNAN
HUKUM
INDONESIA
INDONESIAN
ADVOCATES ASSOCIATION



DEWAN PIMPINAN CABANG
IKATAN ADVOKAT INDONESIA
JEMBER

PKPA
2025

PENDIDIKAN KHUSUS
PROFESI ADVOKAT

23 AGUSTUS s/d
21 SEPTEMBER 2025



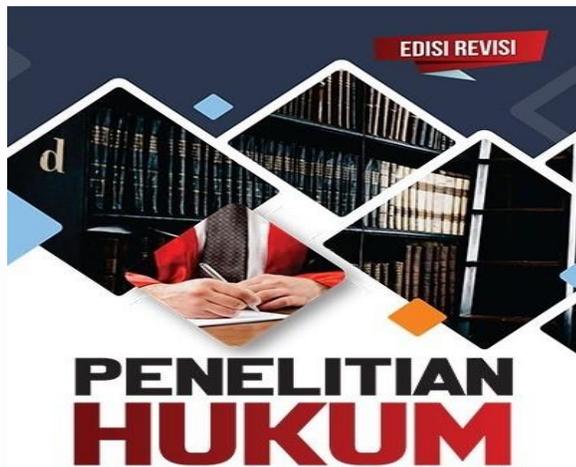
RUMAH

Section

04

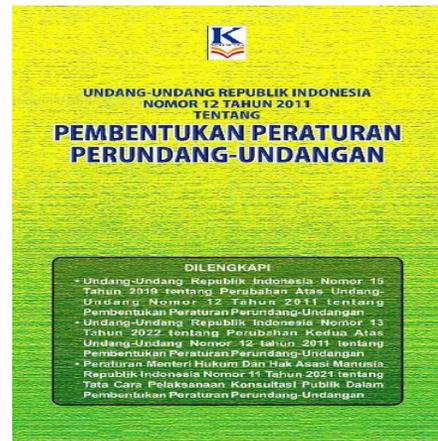
**SUMBER-
SUMBER
HUKUM**

Sumber-Sumber Hukum



 **Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.**
(Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya)

**BAHAN
HUKUM
TERDAPAT
TIGA
KLASIFIKASI**



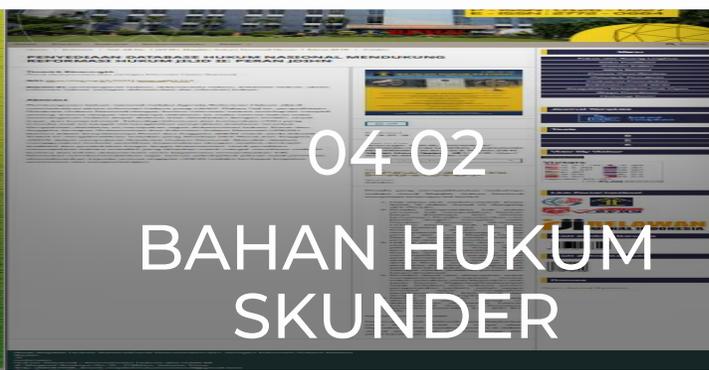
**Bahan
Hukum
Primer**

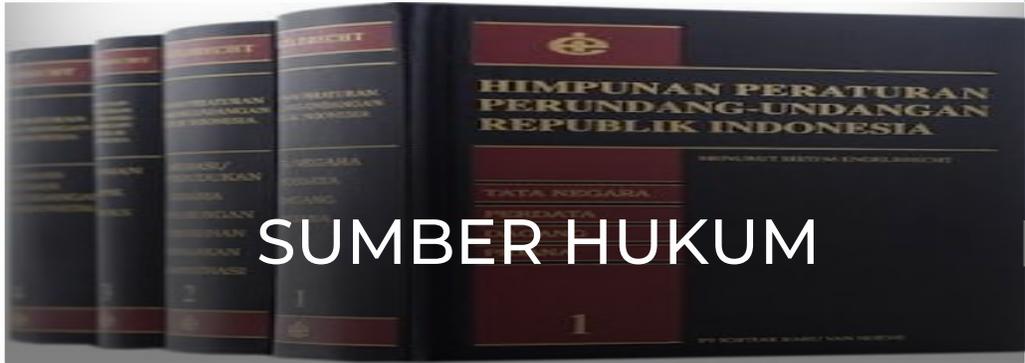


**Bahan
Hukum
Skunder**



**Bahan
Hukum
Tersier**

	 <p>04 01</p> <p>BAHAN HUKUM PRIMER</p>	 <p>04 02</p> <p>BAHAN HUKUM SKUNDER</p>	 <p>04 03</p> <p>BAHAN HUKUM TERSIER</p>
 <p>Target</p>	<p>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IUS CONSTITUENDUM PETUNJUK ATAU PENJELASAN HUKUM</p>		
 <p>Share</p>	<p>KEBIASAAN DOKTRIN</p>		
 <p>Good</p>	<p>YURISPRUDENSI</p>		
 <p>Bad</p>	<p>PERJANJIAN INTERNASIONAL</p>		
 <p>Owner</p>	<p>KONTRAK/PERJANJIAN</p>		



SUMBER HUKUM



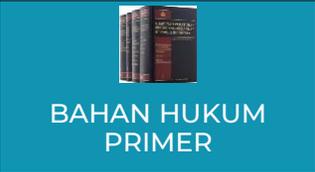
DOKUMENTASI HUKUM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



LEMBARAN NEGARA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA. BERITA NEGARA, TAMBAHAN BERITA NEGARA. LEMBARAN DAERAH, BERITA DAERAH

KEBIASAAN



HUKUM KEBIASAAN, HUKUM ADAT

YURISPRUDENSI



BUKU YURISPRUDENSI, PUTUSAN PENTING

PERJANJIAN INTERNASIONAL



TRAKTAK, KONVENSI, UU RATIFIKASI

KONTRAK/PERJANJIAN



AKTA NOTARIS, PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN, KONTRAK BAKU, KONTRAK ELEKTRONIK



DOKUMENTASI HUKUM TERSEBUT DAPAT DITELUSURI SECARA ONLINE SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN DALAM SLIDE PEMBAHASAN 02 TEHNIK DAN METODE PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM DI ATAS, MISALNYA PENULUSURAN UNDANG-UNDANG, BISA MENTELUSUR MELALUI SALAH SATUNYA JDIHN.GO.ID



PERADI
PERHIMPUNAN
HUKUM ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



DEWAN PIMPINAN CABANG
IKATAN ADVOKAT INDONESIA
JEMBER

PKPA
2025

PENDIDIKAN KHUSUS
PROFESI ADVOKAT

23 AGUSTUS s/d
21 SEPTEMBER 2025

PKPA
2025



RUMAH

Section

05

RANCANGAN DOKUMEN HUKUM DALAM RANGKA LITIGASI

PENYUSUNAN RANCANGAN DOKUMEN HUKUM DALAM RANGKA LITIGASI

PERLU MEMPERTIMBANGKAN TIGA HAL:

- 1. DOKTRIN**
- 2. NORMA**
- 3. PUTUSAN**

BUKU PENINJAUN KEMBALI SEPERTI DI SAMPING

BUKU ITU OLEH BINZIAD KADAFI (2023),
DISUSUN DENGAN TIGA HAL DI ATAS.

BINZIAD KADAFI



PENINJAUAN KEMBALI

KOREKSI KESALAHAN DALAM PUTUSAN



PERADI
PERHIMPUNAN
ADVOKAT INDONESIA
ADVOCATES ASSOCIATION



DEWAN PIMPINAN CABANG
IKATAN ADVOKAT INDONESIA
JEMBER

PKPA
2025

PENDIDIKAN KHUSUS
PROFESI ADVOKAT

23 AGUSTUS s/d
21 SEPTEMBER 2025



RUMAH

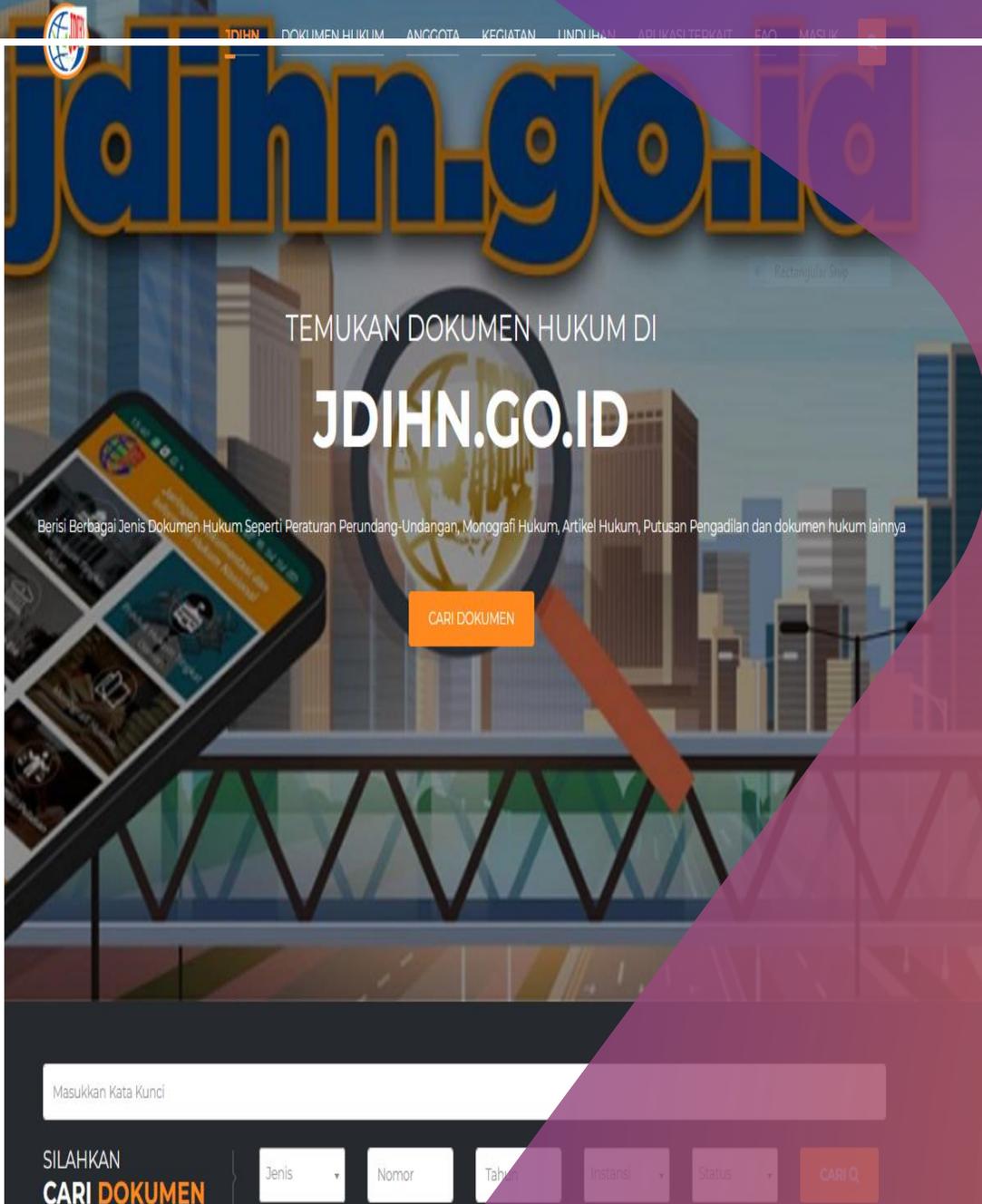
Section

06

CONTOH
KASUS

NOVI PEMILIK MOBIL MENGASURANSIKAN MOBILNYA PADA PERUSAHAAN ASURANSI **PT YOU INSURANCE** TERHADAP BAHAYA TABRAKAN. KEMUDIAN, MOBIL TERSEBUT DIGUNAKAN OLEH NIVO TANPA IJIN DARI NOVI. PADA SAAT DIGUNAKAN OLEH **NIVO**, TERJADI TABRAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BERAT. NIVO KARENA MENGAKU BERSALAH BERSEDIA MENGGANTI KERUGIAN KEPADA NOVI. KARENA NOVI PERNAH BERUTANG BUDI KEPADA NIVO. DIA MEMBEBASKAN NIVO DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN ITU. UNTUK MEMPEROLEH GANTI KERUGIAN, NOVI MENKLAIM PENANGGUNG ASURANSI YOU BERDASARKAN POLIS ASURANSI.





- BEDASARKAN KASUS DI ATAS :
1. APA ITU SUBJEK HUKUM BERDASARKAN HUKUM INDONESIA?
 2. APA SAJA RAGAM SUBJEK HUKUM?
 3. SEBUTKAN DARI MANA INFORMASI SUBJEK HUKUM DIPEROLEH?
 4. MENGAPA NOVI MELAKUKAN KLAIM KEPADA PT YOU INSURANCE
 5. APAKAH NIVO BEBAS DARI KEWAJIBAN?
 6. SEBUTKAN DARI MANA INFORMASI TERSEBUT DIPEROLEH?

DAFTAR BACAAN

1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." [Online]. Available: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
2. Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, "Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa." Pusat Bahasa, Jakarta, 2008. [Online]. Available: https://perpustakaan.elsam.or.id/repository/2008_kamus-tesaurus-indonesia.pdf
3. H. Juwana, "Legal Research Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum," 2020. [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/603321485/Legal-Research-Penelusuran-Hukum-dan-Dokumentasi-Hukum>
4. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional. 2015. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41277/perpres-no-33-tahun-2012>
5. G. Churchill, "Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum Indonesia," *baca.j.dok.inf.*, vol. 13, no. 1-2, pp. 1-40, 1988, doi: 10.14203/j.baca.v13i1-2.8.
6. T. Simorangkir, "Penyediaan Database Hukum Nasional Mendukung Reformasi Hukum Jilid Ii: Peran Jdihn," *Majalah Hukum Nasional*, vol. 48, no. 1, pp. 79-96, 2018, doi: 10.33331/mhn.v48i1.113.
7. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2011.
8. S. Shidarta, "SLIDES: Penelusuran Hukum dan Dokumen Hukum," presented at the Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diadakan oleh PERADI Jakarta Barat bekerja sama dengan Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Apr. 21, 2021. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/384017333_SLIDES_Penelusuran_Hukum_dan_Dokumen_Hukum
9. B. Kadafi, *Peninjauan kembali: koreksi kesalahan dalam putusan*, Cetakan pertama. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023.

THANK YOU

